

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Fakultas Hukum

Oleh:

**HUSAMUDDIN MAULANA**

**NIM: C. 100.140.388**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI  
PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**HUSAMUDDIN MAULANA**

**NIM: C. 100.140.388**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', with a stylized flourish at the end.

(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M. Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI**

**OLEH**

**HUSAMUDDIN MAULANA**  
**NIM: C. 100.140.388**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum  
(Sekretaris)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.Hum  
(Anggota)

(.....  
(.....  
(.....

Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Juni 2018

Penulis



**HUSAMUDDIN MAULANA**  
**NIM: C. 100.140.388**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

## DALAM BENTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI

### Abstrak

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang yang mengalaminya. Jumlah kejadian tindak pidana yang setiap harinya di masyarakat semakin meningkat tentunya memberikan kerugian terhadap korban baik secara mental, fisik maupun materiil. Mengenai upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu (1) Restitusi, (2) penggabungan gugatan ganti rugi (3) melalui gugatan perdata biasa/gugatan melawan hukum dan wanprestasi (4) melalui konsep Alternative Dispute Resolution. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam proses ganti rugi antara lain tuntutan ganti rugi oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Ganti Rugi

### Abstract

*A crime is an unlawful act that causes harm to everyone who experiences it. The number of incidents of crime that every day in the society is increasing, of course, to provide losses to victims both mentally, physically and materially. Regarding the victim's effort to obtain compensation can be done in 4 ways namely (1) Restitution, (2) the merger of the indemnification civil suit, (3) through ordinary civil suit / lawsuit and Default lawsuit (4) Alternative dispute Resolution. But in the implementation there are several obstacles in the process of compensation among other things The claim of compensation by another person who suffered direct losses or the victim to obtain the amount of the compensation is limited only to material losses.*

**Keywords:** Protection of the law, Victim, Compensation

## 1. PENDAHULUAN

Setiap pelaku tindak pidana haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan aturan hukum dibuat untuk ditaati, maka dari itu apabila ada yang melanggar harus dikenakan sanksi. Di Indonesia setiap pidana dijatuhkan semata mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan.<sup>1</sup> Perlindungan hukum bagi korban harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana. Model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia seharusnya mengacu kepada model

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 9

keseimbangan kepentingan, karena memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, individu, pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.<sup>2</sup>

Kedudukan korban dalam proses peradilan sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.<sup>3</sup> Sistem pemidanaan yang ada di Indonesia saat ini seperti sudah tidak lagi menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas dan juga menyebabkan kerusuhan terjadi di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Di Negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental sudah mulai mengenal sistem peradilan pidana yang tidak mendasarkan pemidanaan di lapas atau rutan semata, melainkan sudah mulai menerapkan sistem peradilan pidana *Model Kekeluargaan*.<sup>5</sup>

Suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat pasti selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Korban tindak pidana tidak hanya menerima kerugian materiil berupa hilangnya harta benda, sumber ekonomi keluarga bahkan juga hilangnya nyawa, melainkan juga menerima kerugian yang bersifat psikologis.<sup>6</sup> Dalam masalah ini seharusnya pelaku tindak pidana memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah yang penulis dapat rumuskan adalah (a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam bentuk pembayaran

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 132

<sup>3</sup> Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.dalam Skripsi *Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* UNHAS

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f8f23203f5e/lapas-over-kapasitas--kebijakan-pemidanaan-perlu-dievaluasi>, diakses pada 7 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 84

<sup>6</sup> Ibid, hlm 79

ganti rugi (b) Apa saja kendala yang timbul dalam upaya pemberian ganti rugi terhadap korban atas terjadinya tindak pidana? Dari perumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal ganti rugi dan untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam upaya pemberian ganti rugi terhadap korban atas terjadinya tindak pidana.

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut (a) Manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan perkembangan ilmu pidana dan sebagai bahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis (b) manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak berwenang dalam mengambil kebijakan publik yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pada umumnya, khususnya dalam memahami ganti rugi bagi korban tindak pidana

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.<sup>7</sup> Metode pendekatan yuridis normatif.<sup>8</sup> Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan analisis putusan. Teknik analisis data semua data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Pembayaran Ganti Rugi**

Dalam proses peradilan pidana banyak korban akibat tindak pidana kurang mendapatkan perhatian dari penegak hukum atau kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya ditempatkan sebagai pemberi kesaksian mengenai kejadian yang ia alami,

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 36

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta , hlm 53

sehingga korban dalam proses penegakkan hukum seringkali kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.

Selanjutnya mengenai hak-hak korban tindak pidana dapat diterangkan antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

*1) Saksi dan Korban berhak:*

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. mendapat penerjemah;*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. dirahasiakan identitasnya;*
- j. mendapat identitas baru;*
- k. mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. mendapat tempat kediaman baru;*
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. mendapat nasihat hukum;*
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. mendapat pendampingan.*

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana belumlah memadai untuk melindungi atau mengakomodasi kepentingan dari korban akibat suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana materiil belum mengatur mengenai pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana namun ada satu pasal yang dimungkinkan untuk melindungi korban dalam hal pemberian ganti rugi yaitu Pasal 14c ayat (1) KUHP yang memberikan penjelasan sebagai berikut

*“Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.”*

Pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian ini terdapat dalam hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Namun pengaturan tersebut



tidak menerangkan secara jelas bahwa pasal tersebut ditujukan pada korban tindak pidana namun pasal tersebut memungkinkan bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana ketentuan yang dimaksud tercantum pada Bab XIII KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur dalam beberapa pasal yaitu:

*Pasal 98*

*(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*

*(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.*

*Pasal 99*

*(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.*

*(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.*

*(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.*

*Pasal 100*

*(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.*

*(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.*

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat diidentifikasi mengenai mekanisme penuntutan atau penggabungan ganti rugi yaitu pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka pengadilan

wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pengajuan penggabungan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 98-101 KUHAP maka pihak-pihak yang berkepentingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup> (1) Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. (2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut. (3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “pelaku tindak pidana”. (4) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan

Sebenarnya di dalam rancangan KUHP tahun 2012 terdapat ketentuan mengenai pemberian ganti rugi kepada korban. Ketentuan yang dimaksud mengutamakan kepentingan pelaku yaitu dalam Pasal 71 huruf (d) yang berbunyi “Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan 55 pidana penjara sebisa mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut: pasal 55 huruf (d) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban.

Adapun upaya korban untuk memperoleh ganti rugi dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya litigasi dan non litigasi.

- 1) Selanjutnya mengenai permintaan ganti rugi oleh korban kepada tersangka atau pelaku tindak pidana melalui jalur Litigasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: (1) Dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai pasal 98-100 KUHAP, (2) Dengan permohonan Restitusi kepada LPSK, (3) Melalui mekanisme gugatan perdata perbuatan melawan hukum/wanprestasi.

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

- 2) Kemudian Upaya melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan yang dilakukan oleh korban untuk memperoleh ganti rugi.

Mengenai dasar hukum penanganan kasus melalui jalur non litigasi yaitu salah satunya adalah melalui ADR. ADR dalam suatu perkara pidana adalah dengan adanya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (“ADR”) (“Surat Kapolri 8/2009”)<sup>10</sup>. Dalam surat tersebut ditentukan beberapa penjelasan antara lain:

*(1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR, (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional, (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat, (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan, (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR, (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.*

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.<sup>11</sup>

Mengenai upaya penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh mendapatkan kasus sebagai berikut:

Posisi Kasus (Putusan 187/Pid.B/2010/PN.Klt)

---

<sup>10</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Cara Meminta Mediasi Di Tingkat Kepolisian*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 21.00

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, hlm 2

Terdakwa yang bernama Ali Harahap yang lahir di Jepara, 23 September 1968 berjenis kelamin laki-laki, berusia 42 Tahun berkebangsaan Indonesia dan beralamat di Dukuh Gentan Rt 02/Rw 4, Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di jalan DPU Pedan-Juwiring tepatnya di Ds Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kecelakaan ini disebabkan karena terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi Nopol AD 1869 L sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yaitu saksi Maqruf (Korban) mengalami luka berat

Korban mengajukan gugatan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa melalui majelis hakim supaya terdakwa dihukum pula untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 44.452.587,- (Empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang disampaikan tertanggal 13 Oktober 2010. Namun dari putusan yang dijatuhkan hakim hanya mengabulkan gugatan ganti rugi dari korban sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) karena sebelumnya telah ada kesepakatan terdakwa Ali Harahap telah memberikan bantuan kepada korban sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan dari hasil kesepakatan bahwa terdakwa akan memberikan bantuan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga masih kurang Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Selanjutnya dari kasus di atas, korban mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi. Korban mengajukan gugatan ganti kerugian yang ditujukan kepada terdakwa melalui majelis hakim supaya terdakwa dihukum pula untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 44.452.587,- (Empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang disampaikan tertanggal 13 Oktober 2010.

### **3.2 Kendala yang Timbul dalam Upaya Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Atas Terjadinya Tindak Pidana**

Dalam proses pelaksanaan pemberian ganti rugi atau dalam mekanisme ganti rugi terdapat beberapa hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Menurut Rhena Yulia ada beberapa kelemahan mengenai proses penggabungan

ganti rugi ini, antara lain yaitu:<sup>12</sup> (1) Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri. (2) Tuntutan ganti rugi oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan tersebut. (3) Sementara itu untuk kerugian non material yaitu kerugian immaterial terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri yang mungkin memakan waktu lama. (4) Kondisi yang seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri yang mungkin dapat memakan waktu lama. (5) Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian. (6) Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immaterial tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum. (7) Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immaterial sehingga tidak efisien.

Di dalam pemeriksaan penggabungan perkara dengan ganti kerugian, maka hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian. Berdasarkan kompetensi absolut terutama dari kompetensi relatif hakim harus meneliti secara seksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat). Oleh karena itu sesuai dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, yang pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat). Jadi pada prinsipnya yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan perdata ialah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat).<sup>13</sup>

Apabila terdakwa (tergugat) yang diadili perkara pidananya disidangkan pada pengadilan negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat), maka tuntutan penggabungan ganti rugi tidak dapat diperiksa atau diterima oleh pengadilan negeri yang bersangkutan dengan alasan

---

<sup>12</sup> Rhena Yulia dalam Bambang waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 59

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 83

“tidak berwenang untuk memeriksa”. Jadi yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat).<sup>14</sup>

Selain permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan lainnya, bahwa pengadilan negeri harus mempertimbangkan hal-hal:<sup>15</sup> (1) Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (2) Jadi hakim mempertimbangkan adanya “causaliteit” hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara. (3) Masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita kerugian (korban). (4) Dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali penuntut umum atau terdakwa (tergugat).

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam bentuk pembayaran ganti rugi dapat diterangkan antara lain dalam Pasal 7A dan & 7B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mekanismenya diatur lebih tegas dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Dan Korban, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur dalam BAB XIII KUHAP pasal yaitu Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, 101 KUHAP.

*Kedua*, kendala yang timbul dalam upaya pemberian ganti rugi terhadap korban atas terjadinya tindak pidana sistem penggabungan, tuntutan ganti dibatasi hanya pada kerugian materiil, kerugian immaterial harus mengajukan dengan gugatan perdata, penggabungan dapat memakan waktu lama, pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

masalah pembayaran ganti kerugian, ganti kerugian yang bersifat immaterial hasilnya nihil, putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immaterial tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immaterial sehingga tidak efisien.

*Pertama*, untuk lembaga legislatif untuk membentuk peraturan perundang-perundangan yang memberikan perlindungan terhadap korban secara komprehensif dan jelas. *Kedua*, untuk aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk korban tindak pidana.

#### **4.2 Persantunan**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kedua kakak yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Bapak Natangsa Surbakti selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Jurnal Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Waluyo, Bambang, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f8f23203f5e/lapas-over-kapasitas--kebijakan-pemidanaan-perlu-dievaluasi>, diakses pada 7 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Cara Meminta Mediasi Di Tingkat Kepolisian*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 21.00